

Penjelasan tentang Lisensi (*license*) dalam struktur sepakbola modern dan status badan hukum klub sepakbola di Indonesia

Terkait dengan pemberitaan di media tentang aktivitas jual beli klub serta kaitannya dengan lisensi yang dianggap melanggar aturan FIFA sebagaimana dinyatakan oleh Sekjen BOPI, bersama ini disampaikan penjelasan dari aspek formal dengan melihat kepada aturan yang sesungguhnya untuk memberikan pemahaman yang benar kepada publik.

Status hukum sebuah klub sepakbola saat ini menjadi perbincangan yang menarik pada saat banyak bermunculan proses jual beli atau akuisisi terhadap sebuah klub sepakbola di Indonesia. Salah satu argumentasi yang akan menjadi pembahasan adalah pernyataan Sekjen BOPI tentang larangan FIFA terkait lisensi klub yang diperjualbelikan. Penjelasan dibawah ini akan memberikan gambaran dan pemahaman yang utuh tentang status hukum klub sepakbola dan kaitannya dengan lisensi yang terdapat dalam *Club Licensing Regulations* (FIFA, AFC dan PSSI).

1. Lisensi (*license*)

Pemahaman tentang lisensi dalam konteks sepakbola profesional berbeda dengan pengertian lisensi menurut hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia (sebagai contoh lisensi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Dalam lingkup sepakbola, pengertian lisensi (*license*) pertama kali muncul dalam UEFA *Club Licensing System Manual* di tahun 2002 dimana definisi *license* berarti “*certificate confirming fulfillment of all mandatory minimum requirements by the licensee and granting admission to UEFA club competitions*”. Dengan kata lain *license* atau lisensi adalah sertifikat yang diberikan kepada *licensee*, yang dalam hal ini adalah klub pemohon, dan memiliki hak untuk dapat berpartisipasi di kompetisi antar klub UEFA. Perkembangan *club licensing system* di UEFA kemudian berubah dari sebuah *manual* menjadi *regulations* pada tahun 2008. FIFA sebagai otoritas tertinggi sepakbola dunia pada tahun 2007 telah mengesahkan FIFA *Club Licensing Regulations* yang diadopsi dari UEFA *Club Licensing System Manual* untuk dijalankan di setiap konfederasi terhitung efektif sejak tahun 2008.

Pengertian *license* menurut FIFA *Club Licensing Regulations* sama persis dengan pengertian *license* menurut UEFA *Club Licensing System Manual* sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perbedaannya hanya di jenis kompetisi yang diatur di masing-masing konfederasi. Turunan dari FIFA *Club Licensing Regulations* tersebut maka AFC (konfederasi sepakbola Asia) membuat AFC *Club Licensing Regulations* yang disahkan pada tahun 2010 yang kemudian juga telah diadopsi oleh PSSI di tahun 2010. Secara global maka seluruh konfederasi wajib menjalankan apa yang tertulis di FIFA *Club Licensing Regulations* untuk menjalankan sistem

tersebut yang memiliki objektif terhadap pengembangan kualitas dari kompetisi nasional di sebuah negara dan klub sepakbola sebagai peserta kompetisi dengan level profesional.

Proses untuk mendapatkan lisensi tersebut diatur dalam setiap *club licensing regulations* (FIFA, AFC dan PSSI) dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Lisensi yang diterbitkan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *national regulations* (di tingkat federasi);
- b. Lisensor, dalam hal ini federasi atau pihak yang diberikan mandate oleh federasi sebagai lisensor, harus menyampaikan *invitation* kepada klub yang akan mengikuti proses lisensi. Klub akan mengajukan aplikasi secara tertulis kepada lisensor dan bersedia memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam regulasi;
- c. Hanya klub yang telah mengikuti proses lisensi dan memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam regulasi yang berhak mendapatkan lisensi;
- d. Lisensi berakhir masa berlakunya tanpa pemberitahuan sebelumnya pada akhir musim kompetisi dimana lisensi diberikan;
- e. Lisensi dapat dicabut jika terdapat hal-hal yang diputuskan oleh badan pembuat keputusan (*decision-making bodies*) yang diatur dalam regulasi;
- f. Setelah lisensi dicabut, federasi wajib menyampaikan pemberitahuan kepada konfederasi.
- g. Lisensi tidak dapat dipindahtangankan.

Dari prinsip-prinsip dasar tentang lisensi tersebut, penjelasan Sekjen BOPI tentang pelanggaran yang dianggap dilakukan oleh pengelola kompetisi dalam hal ini PT Liga Indonesia adalah keliru dan tidak berdasar. Pemahaman tentang *club licensing system* tidak dapat dibaca atau diinterpretasikan secara terpisah-pisah. *Club licensing regulations* adalah sebuah aturan yang menjelaskan tentang sistem *club licensing* dengan struktur sebagai berikut:

- ♣ *Objectives*;
- ♣ Prosedur;
- ♣ Lisensor;
- ♣ Pemohon lisensi dan lisensi;
- ♣ Proses lisensi (*core process*); dan
- ♣ Kriteria (*sporting, infrastructure, personnel and administrative, legal and financial*) beserta dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Struktur dari *club licensing regulations* tersebut menegaskan bahwa sistem ini adalah suatu kesatuan yang harus dipahami secara utuh dimana lisensi itu sendiri adalah sebuah hasil dari proses yang dilakukan dalam *club licensing system* dan bukan pengertian lisensi dari sebuah klub untuk dapat diperjualbelikan dari aspek bisnis sebagaimana yang dijelaskan oleh BOPI. Dengan kata lain tidak terdapat hubungan yang jelas tentang lisensi yang diatur menurut *club licensing regulations* dengan

proses pergantian atau akuisisi sebuah klub sepakbola di Indonesia sehingga tidak memiliki dampak pelanggaran dari regulasi yang dimaksud oleh Sekjen BOPI.

Sebagai catatan tambahan dalam proses lisensi yang telah dijalankan di Indonesia sejak tahun 2008, sejatinya hanya ada 3 klub yang mendapatkan lisensi, itupun dengan catatan khusus apabila dalam waktu tertentu tidak dapat memenuhi persyaratan akan dicabut, yaitu PERSIPURA, Arema Indonesia dan PERSIB.

2. Status badan hukum klub sepakbola Indonesia

Perkembangan status hukum sepakbola di Indonesia mulai berubah sejak adanya persyaratan AFC untuk standar kompetisi profesional pada tahun 2008 seiring dengan bergulirnya kompetisi *Indonesia Super League*. (ISL) Dalam salah satu kriteria yaitu kriteria legal dipersyaratkan setiap klub wajib berbentuk badan hukum (*legal entity*) yang *profit oriented* yang kemudian diterjemahkan menurut sistem hukum Indonesia adalah badan hukum perseroan terbatas (PT). Dari hal tersebut maka sejak 2008 menjadi sebuah persyaratan klub yang ikut di ISL wajib berbadan hukum PT yang kemudian ditegaskan juga dalam PSSI *Club Licensing Regulations*.

Jika dilihat dari status sebuah klub sepakbola maka ada 2 aspek yang terkait yaitu klub sebagai anggota PSSI dan peserta kompetisi serta klub sebagai sebuah badan hukum. Melihat klub sebagai anggota PSSI dan peserta kompetisi maka mengacu kepada Statuta PSSI serta regulasi dari kompetisi, dalam hal ini adalah ISL, dimana persyaratan dan hak serta kewajiban klub sebagai anggota PSSI sangat rinci tertulis di Statuta dan sisi lain hak dan kewajiban klub sebagai peserta kompetisi juga tertera jelas di regulasi. Di sisi lain, klub sebagai sebuah badan hukum maka tunduk kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang terkait (contoh: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Peraturan Pemerintah terkait merger dan akuisisi).

Apabila melihat penjelasan Sekjen BOPI tentang status hukum klub yang dengan mudahnya berpindah atau diperjualbelikan, maka yang dilakukan oleh klub yang melakukan aktivitas tersebut semata-mata untuk kepentingan bisnis dari pemilik klub yang memiliki hak sebesar-besarnya melakukan tindakan hukum apapun dengan tetap tunduk kepada hukum positif. Dari sisi organisasi di PSSI, maka terhadap perubahan yang dilakukan klub hanya menyampaikan notifikasi disertai dengan bukti atau dokumen legal yang menyatakan bahwa proses hukum terkait jual beli baik asset maupun saham maupun akuisisi ataupun merger dilakukan sesuai dengan hukum positif yang berlaku termasuk hak klub untuk melakukan pergantian nama atau domisili. Memang menjadi pertanyaan apabila proses jual beli klub dikaitkan dengan history dari klub tersebut namun sekali lagi adalah hak pemilik klub untuk melakukan tindakan

apapun selama tidak melanggar anggaran dasar klub sebagai sebuah perseroan atau undang-undang dalam arti luas. Klub memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang sebagai sebuah perseroan terbatas untuk melakukan tindakan hukum dan jika ada pelanggaran terhadap hal tersebut maka menjadi domain negara untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang menjadi contoh di luar negeri khususnya trend dimana banyak pengusaha yang tertarik untuk membeli sebuah klub sepakbola namun tidak melakukan pergantian nama klub tersebut dan biasanya melakukan aktivitas jual beli saham dari klub tersebut, merupakan hal yang harus dilihat dari sisi bisnis. Klub di Eropa bukan menjadi sebuah entitas bisnis semata melainkan menjadi sebuah *brand* yang menarik bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dari *brand* tersebut sehingga justru nama dari klub tersebut yang menjadi daya tarik.

Menjadi pelajaran dan pemahaman yang menarik pada saat banyak orang berbicara tentang status klub sepakbola karena sejatinya saat ini sepakbola memang tidak dapat dipisahkan dari industry dan bisnis dan menjadi hak klub termasuk pemilik nya untuk melakukan aktivitas apapun selama tidak bertentangan dengan aturan organisasi sepakbola dan aturan hukum positif negara.

Pada akhir tulisan, beberapa hal yang dapat digarisbawahi untuk mendapatkan gambaran tentang status hukum badan klub sepakbola Indonesia:

1. Pemahaman yang utuh tentang regulasi sepakbola termasuk perkembangan sepakbola modern dan profesional yang sifatnya dinamis. Sepakbola sebagai sebuah olahraga saat ini telah berkembang menjadi sistem yang modern yang didalamnya terkait dengan banyak aspek sehingga diperlukan analisa yang cerdas untuk dapat menyelami apa yang terjadi sekarang dalam perkembangan sepakbola modern.
2. Status badan hukum klub tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadi penghambat perkembangan sepakbola karena sepakbola telah menjadi sebuah entitas bisnis yang memberikan dampak positif bagi banyak pihak.

TIGORSHALOM BOBOY

Corporate Secretary PT Liga Indonesia
Licensing Manager PSSI